

Pengaruh Akuntabilitas, Potensi Daerah, dan Aset Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018

Transparency of
Local Government
Financial Reports

167

Rosalia dan Pingky Dezar Zulkarnain
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Bogor, Indonesia
E-Mail: rosalia@ibik.ac.id

Submitted:
FEBRUARI 2020

Accepted:
JULI 2020

ABSTRACT

This study aims to find out several factors that affect the transparency of local governments after the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning the Freedom of Information Act. This research focuses on the practice of the publication of local government financial reports and information about the local budget (APBD) on the website of each local government. The population in this study is the local government in the province of West Java in total 28 local governments. In this study, a period of 3 years was used, namely from 2016 to 2018. So the total sample in this study was 84 samples. The type of data in this study is secondary data. The analytical tool used is SPSS 24 for windows software. The analytical method used is logistic regression analysis with a significance level of 5%. The result showed accountability, regional potential and regional assets together influence the transparency of local government. The accountability variable that is proxied into audit opinion does not affect the transparency of local government. This means that the WTP opinion obtained by the regional government does not encourage the regional government to practice the publication of financial reports and APBD information on the respective regional government website. Furthermore, regional potential variables significantly influence the transparency of local governments.

Keywords: Accountability, Regional potential, Regional Asset, Publication, Transparency, Website

PENDAHULUAN

Transparansi laporan keuangan daerah akan terwujud jika pemerintah daerah dapat meningkatkan pertanggungjawabannya kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Robert (2006) dalam Bertot, dkk (2010), *In terms of international practices in transparency, the Internet has greatly reduced the cost of collecting, distributing, and accessing government information.* Salah satu bentuk transparansi Pemerintah untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan Pemerintah daerah di internet. Menurut Bertot, dkk (2010), kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah, sekarang dianggap penting untuk menjamin partisipasi demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah, mencegah korupsi, pengambilan keputusan berdasarkan informasi, kekakuratan informasi pemerintah, ketersediaan informasi bagi publik, perusahaan, dan jurnalis.

Bagi sebagian daerah, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berupa publikasi melalui internet ataupun media lain belum menjadi hal yang umum, sehingga masyarakat tidak mudah mengetahui informasi mengenai kinerja pemerintahan, hal tersebut belum sejalan dengan UU no. 14 tahun 2008 pasal 13 yang menyatakan bahwa Informasi keuangan daerah harus disajikan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Menurut Rahman dkk. 2013 (dalam Trisnawati & Komarudin, 2014) menunjukkan bahwa *website* pemerintahan daerah belum digunakan secara optimal dalam

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 8 No. 2, 2020
pg. 167-176
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 - 3048

mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan.

Tingkat transparansi pemerintah daerah yang rendah berupa laporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemerintah dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas harus selalu dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai suatu entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan daerah. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya prinsip akuntabilitas yang memperlihatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan transparansi laporan keuangan, tidak saja disebabkan karena kurangnya penerapan akuntabilitas tetapi juga karena laporan keuangan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna seperti aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang jumlahnya lebih besar akan memiliki biaya yang lebih tinggi untuk pengawasan dan akan berusaha untuk memenuhi tuntutan berupa transparansi dari masyarakat, maka pemerintah daerah seharusnya mengungkapkan informasi keuangan secara lebih lengkap melalui *website* pemerintah daerah masing-masing (Pratama *et al*, 2015, dalam Fachru Rozi 2018).

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat tingkat transparansi pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel akuntabilitas, potensi daerah, dan aset daerah karena dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul Penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Potensi daerah dan Aset daerah terhadap Transparansi Pemerintah daerah”.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ialah metode statistik deksriptif dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji multikolinearitas, uji nilai $-2 \log Likelihood$, *Hosmer and Lemeshow Test*, koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*), *Omibus Test of Model Coefficients*, dan uji koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi *website* masing-masing pemerintah daerah baik kota, kabupaten ataupun Provinsi Jawa Barat dengan domain go.id. Total pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat adalah 28 pemda dimana 18 merupakan pemerintah daerah kabupaten, 9 merupakan pemerintah daerah kota dan 1 merupakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan periode selama 3 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2018, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 84 sampel.

Analisis Data Penelitian

Analisis Statistik Dekriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Dekriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DTRANS	84	0	1	.40	.494
DAKUN	84	0	1	.89	.311
POT	107	24.92	30.61	27.0996	1.00579
AS	107	27.89	31.32	29.0081	.76958
Valid N (listwise)	84				

Sumber : Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1, variabel transparansi (DTRANS) memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1, hal ini disebabkan karena data dari variabel transparansi merupakan data dikotonomi berupa kategori 0 dan 1. Nilai rata-rata variabel transparansi adalah 0,40 dan nilai standar deviasi sebesar 0,494, artinya ukuran penyebaran variabel transparansi adalah sebesar 0,494 dari 84 data penelitian.

Variabel akuntabilitas (DAKUN) yang diproksikan dalam opini audit memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Hal ini karena variabel akuntabilitas merupakan variabel *dummy* dimana skor 1 didapat untuk pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK sedangkan skor 0 didapat untuk pemerintah daerah yang memperoleh opini selain opini WTP dari BPK. Dari total keseluruhan sampel sebanyak 75 sampel mendapat opini WTP atau sebesar 89%, dan sisanya sebanyak 11% adalah sampel yang memperoleh opini non WTP. Untuk tahun 2016, sebanyak 25 pemerintah daerah mendapat opini WTP, di tahun 2017 dan 2018 sebanyak 25 pemerintah daerah juga mendapat opini WTP dari BPK, dan sisanya mendapat opini selain WTP. Nilai rata-rata variabel akuntabilitas adalah 0,89 dengan standar deviasi 0,311 yang berarti bahwa ukuran penyebaran variabel akuntabilitas yang diproksikan dalam opini audit adalah sebesar 0,311 dari total 84 sampel penelitian.

Variabel potensi daerah (POT) yang diproksikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum 24,92 dan nilai maksimum 30,61. Dari keseluruhan sampel, pemda dengan nilai pendapatan asli daerah paling rendah adalah pemerintah daerah Kabupaten Karawang baik untuk tahun 2016, 2017 maupun 2018. Selanjutnya nilai rata-rata untuk variabel potensi daerah adalah 27,09 dengan standar deviasi sebesar 1,0057 yang artinya bahwa ukuran penyebaran variabel potensi daerah yang diproksikan dalam pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,0057 dari 84 data penelitian.

Variabel aset daerah (AS) yang diproksikan ke dalam aset tetap memiliki nilai terkecil sebesar 27,89 dan nilai terbesar yaitu 31,32. Dari keseluruhan sampel pemerintah daerah yang memiliki aset tetap terendah adalah Kota Depok baik dari tahun 2016, 2017 maupun 2018, namun aset tetap Kota Depok tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Rata-rata variabel aset daerah adalah sebesar 29,008 dan standar deviasi sebesar 0,769 yang berarti bahwa ukuran penyebaran variabel aset daerah yang diproksikan dalam aset tetap daerah adalah 0,769 dari total sampel.

Analisis Regresi Logistik

Tabel 2 Data Sampel Penelitian

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	84	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	84	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		84	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sumber : Output SPSS, 2020

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tidak ada *missing cases* dalam model penelitian ini sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 sampel (28 Pemerintah daerah dikali 3 tahun) atau dapat dikatakan 100% sampel dalam penelitian ini dapat digunakan.

Tabel 3 Pengkodean Variabel Dependen

Original Value	Internal Value
Tidak Ada	0
ADA	1

Sumber : Output SPSS, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan kode dari variabel dependen dalam penelitian karena data variabel dependen dalam penelitian ini merupakan data *dummy*. Terdapat 2 kategori dalam variabel dependen yaitu kategori “Ada” untuk pemerintah daerah yang melakukan

publikasi laporan keuangan pemerintah daerah berserta informasi mengenai APBD di *website* masing-masing pemda dan diberi kode 1, sedangkan kategori “Tidak ada” adalah untuk pemda yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah dan informasi mengenai APBD sehingga diberi kode 0. Pengkodean ini untuk menjelaskan variabel dari transparansi pemerintah daerah. Karena kode 1 diberikan kepada pemerintah daerah yang melakukan publikasi laporan keuangan di *website* masing-masing pemda, maka kategori “Ada” menjadi efek dari sebab. Sebab dalam penelitian ini berarti variabel yang dihipotesiskan penyebab munculnya efek atau masalah.

Uji -2 Log Likelihood

Tabel 7. Gabungan Uji Nilai -2 Log Likelihood

	Nilai -2 Log Likelihood
Block 0	113,382
Block 1	103,409

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Penilaian pada Uji -2 Log Likelihood adalah dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood pada saat *block number* = 0 (awal) dengan nilai -2 Log Likelihood pada saat *block number* = 1 (variabel independen dan konstanta dimasukkan). Tabel 4.5 menunjukkan nilai -2 Log Likelihood ketika *block number* = 0 yaitu sebesar 113,382 dan tabel 4.6 menunjukkan nilai -2 Log Likelihood pada saat *block number* = 1 yaitu sebesar 103,409. pada tabel 4.7 terlihat bahwa nilai -2 Log Likelihood akhir mengalami penurunan dibandingkan dengan -2 Log Likelihood yang dihasilkan diawal. Selisih antara -2 Log Likelihood awal dengan yang akhir adalah sebesar $113,382 - 103,409 = 9,973$. Hal ini menunjukkan model regresi dalam penelitian ini baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Nagelkerke R Square*. Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,151, hal ini memiliki arti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 15,1% variabel dependennya, dan sisanya yaitu sebesar 84,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil nilai *Nagelkerke R Square* dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 15,1% dengan kata lain variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 15,1 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel selain variabel akuntabilitas, potensi daerah dan aset daerah.

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.409 ^a	.112	.151

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Output SPSS, 2020

Omnibus Test Of Model Coefficient

Tabel 10 Omnibus Test Of Model Coefficient

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	9.974	3	.019
	Block	9.974	3	.019
	Model	9.974	3	.019

Sumber : Output SPSS, 2020

Tabel 4.10 menunjukkan nilai *Chi-Square* sebesar 9,974 dengan signifikansi 0,019. Nilai signifikansi yang dihasilkan pada tabel *Omnibus Test of Model Coefficient* diatas lebih kecil dari dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, potensi daerah dan aset daerah secara

simultan mempengaruhi variabel transparansi pemerintah daerah. Hal ini juga memberikan arti bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya.

Uji Koefisien Regresi

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Rregresi

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	DAKUN	-.431	.746	.334	1	.563	.650	.151	2.802
	POT	1.385	.533	6.759	1	.009	3.996	1.406	11.356
	AS	-1.179	.633	3.470	1	.062	.308	.089	1.063
	Constant	-3.365	9.550	.124	1	.725	.035		

a. Variable(s) entered on step 1: DAKUN, POT, AS.

Sumber : Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik maka persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

$$DTRANS = -3,365 -0,431(DAKUN) + 1,385 (LnPOT) -1,179 (LnAS) + e$$

Gambar 2 Hasil Persamaan Regresi

Berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan di atas, maka kesimpulan terhadap hubungan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas adalah negatif sebesar 0,431. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan transparansi pemerintah daerah sebesar 0,431 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel potensi daerah adalah positif sebesar 1,385. Hal ini berarti setiap peningkatan potensi daerah sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan transparansi pemerintah daerah sebesar 1,385 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. koefisien regresi dari variabel aset daerah adalah negatif sebesar 1,179. Nilai konstanta sebesar negatif 1,179 menunjukkan bahwa setiap peningkatan aset daerah sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan transparansi pemerintah daerah sebesar 1,179 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah akuntabilitas yang di proksikan pada opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan tabel *Variables in the Equation* tingkat signifikansi dari variabel akuntabilitas adalah 0,563 yang berarti lebih besar dari derajat kepercayaan (0,05) sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah tidak diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel potensi daerah memiliki nilai signifikansi 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa potensi daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan potensi daerah berpengaruh terhadap transparansi daerah dapat diterima.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pada 4.11, nilai signifikansi dari variabel aset daerah adalah 0,062. Nilai tersebut menunjukkan bahwa transparansi pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh aset daerah pada tingkat signifikansi 5% karena nilainya lebih besar dari 0,05.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh akuntabilitas yang diproksikan pada opini audit terhadap transparansi

pemerintah daerah. Hipotesis yang mengharapkan adanya pengaruh akuntabilitas yang diproksikan pada opini audit nyatanya tidak didukung secara statistik dalam penelitian ini, hal ini berarti opini WTP yang diperoleh oleh pemda nyatanya tidak mendorong pemerintah daerah untuk selalu mempublikasikan laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Dalam teori *signalling*, pemerintah yang mendapatkan opini WTP akan cenderung memberikan sinyal yang baik atas kinerjanya pada masyarakat, namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP akan selalu mempublikasikan laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak ditemukan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas finansial di Provinsi Jawa Barat masih lemah sehingga masih perlu dilakukan banyak upaya perbaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WTP dari BPK tidak selalu mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah tersebut buruk ataupun sebaliknya, nyatanya masih banyak penilaian agar pemda tersebut memiliki akuntabilitas yang baik seperti hasil penilaian EKPPD dan hasil penilaian LAKIP, maka dari itu kinerja dan akuntabilitas yang baik dari pemda tidak hanya ditunjukkan pada laporan keuangan saja. Bahkan terdapat kasus dari pemerintah daerah yang sengaja melakukan suap kepada BPK untuk mendapatkan opini WTP.

Opini audit tidak secara langsung mempengaruhi pemda untuk selalu mempublikasikan laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda, karena WTP ini belum tentu menunjukkan sinyal pengelolaan keuangan yang baik bagi suatu pemda dan opini WTP ini tidak menjamin suatu pemda bebas dari korupsi ataupun kasus suap karena masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang diketahui melalui tindakan OTT oleh KPK pada instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dari BPK. Pemberian opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) yang membuktikan bahwa pemerintah yang berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK tidak mempengaruhi pemda yang bersangkutan untuk melakukan praktik publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Destya (2019), yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Menurut Destya, dalam teori institusional, *coercive isomorphism* disebabkan karena adanya tekanan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dimana laporan keuangan pemerintah daerah wajib diaudit oleh BPK dan dilaporkan kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas. Sehingga opini audit WTP ini tidak mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya di internet tetapi merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah untuk selalu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAP yang nantinya akan menunjukkan bahwa akuntabilitas dari pemerintah daerah tersebut baik.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh langsung terhadap transparansi pemerintah daerah. Abdul, dkk(2018), mendapatkan hasil penelitian yang berbeda, yaitu bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap penggunaan IFR (*Internet Financial Reporting*), menurutnya semakin baik opini audit yang didapatkan oleh badan publik maka diharapkan semakin baik pula pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh badan publik, sebaliknya jika opini yang didapatkan kurang baik, maka badan publik memiliki kecenderungan untuk tidak menyampaikan laporan keuangannya di internet.

Pengaruh Potensi Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel potensi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah, hal ini berarti hipotesis kedua yang mengharapkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel potensi daerah

dengan transparansi daerah didukung secara statistik oleh hasil penelitian. Dari hasil tersebut artinya semakin tinggi potensi daerah yang diproksikan dalam pendapatan asli daerah akan mendorong pemda untuk meningkatkan transparansinya dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* masing-masing pemda. Dalam teori *signalling* pemerintah yang memiliki potensi daerah yang besar memiliki kecenderungan yang besar pula untuk melaporkan keuangannya, tujuannya agar masyarakat mengetahui bagaimana potensi daerah tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dimana dua komponen tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, membuat pemerintah daerah terdorong untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Potensi daerah yang besar menjadikan masyarakat ingin selalu mengawasi bagaimana potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dikelola dengan benar sehingga menuntut pemerintah untuk selalu transparan dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu jika potensi daerah yang diproksikan dalam pendapatan asli daerah ini memiliki nilai yang besar maka hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan sehingga masyarakat perlu mendukung kinerja pemerintah melalui pengawasan pengelolaan keuangannya. Melalui internet pemerintah daerah bisa memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Selain murah dan cepat, publikasi laporan keuangan melalui internet juga membuat masyarakat lebih mudah dalam melihat transparansi dari pemerintah daerah dan membuat perspektif di masyarakat bahwa pemerintah daerahnya terbuka dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kadek dan Desak (2015) yang menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan daerah yang diproksikan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kecenderungan untuk melakukan pelaporan keuangan daerah melalui internet juga semakin tinggi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ariefia dan Rizal (2016) mendapatkan hasil yang berbeda dimana kekayaan pemda yang dinyatakan dengan jumlah pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap terciptanya *internet financial reporting* melalui *e-government*, menurutnya kekayaan pemda tidak memberikan dampak secara langsung bahwa masyarakatnya membutuhkan informasi keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah pada *website* masing-masing Pemda.

Pengaruh Aset Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa aset daerah yang di proksikan kedalam aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah karena berdasarkan hasil statistik nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang memiliki aset tetap yang besar masih cenderung belum memanfaatkan *website* yang dimiliki masing-masing pemda di internet untuk melaporkan laporan keuangannya, padahal internet merupakan salah satu media yang sangat mudah untuk memperlihatkan transparansi dari pemda kepada masyarakat jika dibandingkan dengan menggunakan media lain yang mungkin dalam hal pengadaannya lebih memakan biaya yang lebih banyak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pemerintah yang memiliki aset tetap yang besar tidak secara otomatis membuat pemda melakukan praktik publikasi laporan keuangan yang dimilikinya melalui *website* masing-masing pemda.

Jika dikaitkan dengan teori *signalling*, pemerintah yang memiliki aset daerah yang besar maka dorongan untuk lebih transparan kepada masyarakat juga akan semakin besar dan pemerintah daerah juga akan memberikan informasi keuangan yang positif sebagai sinyal bahwa aset daerah tersebut telah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aset daerah tidak membuat pemerintah daerah meningkatkan transparansinya untuk mempublikasikan laporan keuangannya di *website* pemda, hal ini bisa saja disebabkan oleh sifat badan publik yang cenderung menyembunyikan informasi dan tidak menggunakan *website* masing-masing pemda untuk melaporkan laporan keuangan yang dimilikinya, karena jika laporan keuangan ada di *website* masing-masing pemda akses terhadap informasi mengenai aset daerah terutama

aset tetap akan mudah diketahui seperti informasi mengenai insfrastruktur, belanja daerah dan belanja modalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kekayaan daerah. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Trisnawati dan Komarudin (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemda yang diproksikan pada total aset daerah memiliki pengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet, hal ini berarti ukuran pemda yang besar akan mendorong pemda yang bersangkutan untuk mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet karena pemda yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks sehingga akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar.

Pengaruh Akuntabilitas, Potensi Daerah dan Aset Daerah secara simultan terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependennya dapat dilihat pada tabel Pengujian menggunakan *Omnibus Test Model Coefficient*. Berdasarkan uji *Omnibus Test Model Coefficient* hipotesis dapat diterima jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 0,019, dengan demikian nilainya berada dibawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, potensi daerah, dan aset daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Sesuai dengan teori *signalling* untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah maka pemda akan meningkatkan kepercayaannya kepada masyarakat dengan cara memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa penyajian informasi keuangan yang positif dan mudah diakses. *Website* masing-masing pemda merupakan media yang efektif bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan sinyal positif pada masyarakat, karena selain tidak memerlukan biaya yang mahal *website* masing-masing pemda juga merupakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Cara pemda merealisasikannya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat, pengemasan prestasi dan kinerja keuangan yang menarik untuk dibaca masyarakat di *website* masing-masing pemda.

Sejalan dengan teori *signalling*, pemerintah yang mendapatkan opini WTP, memiliki aset dan potensi daerah yang besar akan cenderung memberikan sinyal yang baik atas kinerjanya selama ini kepada masyarakat, artinya faktor-faktor tersebut secara bersama-sama akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansinya kepada masyarakat salah satunya dengan mempublikasikan laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Hal ini disebabkan karena pemda yang mendapatkan opini WTP artinya telah menjalankan akuntabilitas finansialnya secara baik dan menjadikan hal tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Selain mendapat opini WTP, pemda dengan aset dan potensi daerah yang besar juga akan menunjukkan sinyal-sinyal yang baik dengan cara mengungkapkannya di *website* masing-masing pemda sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan pemerintah di daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Trisnawati dan Komarudin (2014) yang menunjukkan bahwa variabel kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kekayaan pemda, tipe pemda dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0,006 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen dalam penelitian Trisnawati dan Komarudin berpengaruh terhadap variabel dependennya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Hal ini berarti akuntabilitas yang diukur berdasarkan opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah dalam meningkatkan praktik publikasi laporan keuangan di *website* masing-masing pemda. Opini WTP tidak mendorong pemerintah untuk meningkatkan tingkat transparansinya, hal ini dapat dikarenakan karena opini merupakan kewajiban dari akuntabilitas finansial yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini menunjukkan bahwa apapun opini audit yang diperoleh oleh pemerintah daerah bukan menjadi sesuatu yang cukup penting untuk disampaikan kepada publik. Keengganan untuk menyampaikan opini cukup beralasan jika merujuk pada kejadian di lima tahun terakhir dimana tindak pidana korupsi yang diketahui melalui mekanisme OTT oleh KPK terjadi pada instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dari BPK. Hal ini kemudian mengubah persepsi masyarakat bahwa opini belum tentu menentukan pengelolaan keuangan pemda baik atau buruk sehingga membuat pemerintah daerah tidak terdorong untuk mempublikasikan laporan keuangannya di *website* masing-masing Pemda.
2. Potensi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Semakin besar potensi daerah yang diprosikan dalam pendapatan asli daerah membuat pemerintah daerah terdorong untuk melakukan praktik publikasi laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Pemda yang memiliki potensi daerah yang besar dituntut lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tingginya partisipasi dari masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah selain membuat masyarakat ingin mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah, tetapi juga akan meningkatkan pengawasan dari masyarakat mengenai bagaimana pemerintah memanfaatkan dan mengelola pendapatan asli daerah yang besar tersebut. Hal tersebut menjadikan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk selalu transparan lebih tinggi dalam hal ini meningkatkan pemerintah untuk melakukan praktik publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di *website* masing-masing pemda.
3. Aset daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Semakin tinggi aset daerah yang diprosikan pada aset tetap nyatanya tidak mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan publikasi laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Hal ini bisa saja dikarenakan sifat pemerintah daerah yang cenderung menyembunyikan informasi-informasi dalam belanja modal yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat sehingga sangat sedikit informasi keuangan yang terdapat dalam *website* masing-masing pemda. Selain itu keingintahuan masyarakat bukan berfokus pada seberapa besar aset tetap yang dimiliki daerah tersebut, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana pemerintah daerah merealisasikan janji-janjinya agar membuat daerahnya lebih baik serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah menganggap melaporkan informasi keuangan di *website* masing-masing daerah kurang diperlukan. Jika dikaitkan dengan poin nomor satu sebelumnya, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara statistik cenderung tertutup untuk menyajikan bagaimana aset daerah tersebut dikelola yang menjadikan pemerintah enggan untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi APBD kedalam *website* masing-masing pemda.
4. Akuntabilitas, Potensi daerah dan Aset Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Transparansi Pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Potensi daerah dan Aset daerah secara bersama-sama mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan praktik publikasi laporan keuangannya di *website* masing-masing pemda. Akuntabilitas, potensi daerah dan aset daerah yang

semakin baik membuat pemerintah daerah lebih transparan terhadap informasi keuangannya, selain untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dengan pemerintah, semakin tingginya transparansi dari pemerintah daerah juga akan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Sinyal-sinyal baik ini nantinya akan mendorong masyarakat untuk terus mendukung kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya dan membuat persepsi masyarakat menjadi positif terhadap pemerintah di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Made Pratama. Utama, Sidharta. Rossieta Hilda. 2018. *Transparency of Local Government in Indonesia*. Asian Journal of Accounting Research Vol.3 :123-138.
- Afiah, Nur Nunuy. 2010. Akuntansi Pemerintahan : *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana. Surabaya.
- Arfyansyah, Rahmad, Dian. Haryanto .2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah*[Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bertot, John. Jaeger, Paul. Grimes, justin. 2010. *Using ICTs to Create a Culture of Transparency ; E- Government and Social media as openness and anti-corruption tools for societies*. Government Information Quarterly 27 : 264-271.
- Hanifah, Suci Indah. Praptoyo, Sugeng. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa*. Jurnal ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No 8.
- Mahmud, Amir. Hudoyo, Yacoeb, Triyandy. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal 3(4) ISSN 2252-6765.
- Martani, Dwi. Fitriasisari, Debby. Annisa. 2013. *Transparansi Keuangan dan Kinerja pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia*. Proceeding PESAT VOL 5 ISSN : 1858-2559.
- Nadir, Rasyidah dan Arsyad, Muhammad. Tawakkal. 2019. *Analisis Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui E-Government* Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (PP.464-470).
- Nosihana, Ariefa. Yaya, Rizal. 2016. *Internet Financial Reporting dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten D Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 3(2). 2016. Pp 87-101.
- Pratama, Kadek Dwi Aris. Werastuti, Sri Desak Nyoman. Sujana, Edy. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-journal s1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 3 No. 1.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk mewujudkan Pemerintah yang baik di Daerah*[Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saming, Abdul. Pontoh, Grace T. Rasyid, Syarifuddin. 2018. *Faktor-Faktor Penentu Penggunaan Internet Financial Reporting (IFR) Melalui E-Government Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Sari, Diana. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Widyatama.
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah di Indonesia*[Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setyaningrum, Dyah. Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 No. 2 hal 154-170.